

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan:

1. Konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan anggaran daerah yang terjabarkan dalam RKPD, KUA, dan APBD Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013-2015 bidang fisik dan prasarana pada SKPD DPU, Dishubkominfo, dan Kapedal selama tiga tahun cenderung naik ini dibuktikan pada SKPD DPU pada tahun 2013 sebesar 77%, tahun 2014 sebesar 82%, dan tahun 2015 sebesar 96%. Pada SKPD Dishubkominfo tahun 2013 sebesar 83%, tahun 2014 sebesar 88%, dan tahun 2015 sebesar 94%, sedangkan SKPD Kapedal tingkat konsistensi tahun 2013 sebesar 88%, tahun 2014 sebesar 88%, dan tahun 2015 sebesar 100%.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi adalah Pemahaman antara SKPD, Bappeda, DPPKAD, TAPD, serta DPRD terhadap program kegiatan sesuai Permendagri 54 Tahun 2010 dalam menjabarkan program dan kegiatan pada SKPD; kebijakan pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terhadap program kegiatan wajib bagi SKPD; adanya hasil evaluasi RAPBD oleh Gubernur; dan terwadahnya pokok-pokok pikiran DPRD kedalam program kegiatan SKPD sesuai dengan tema prioritas pembangunan pada setiap tahunnya.
3. Tingkat konsistensi pada ketiga SKPD bidang fisik prasarana terjadi pada tahapan penganggaran yaitu proses RAPBD menjadi APBD, proses tersebut

terjadi karena banyak aktor dari berbagai kepentingan mulai dari pengambil kebijakan pada eksekutif dan TAPD, maupun dari DPRD yang mempunyai hak bugeting.

4. Program kegiatan yang sering bergeser dan konsistensi tidak tercapai justru pada program kegiatan untuk semua SKPD yang wajib dilaksanakan seperti program kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam perencanaan tetap direncanakan terus padahal dalam penganggaran masuk program peningkatan pelayanan publik.
5. Kurangnya konsistensi pada bidang fisik prasarana SKPD DPU tertinggi dibanding SKPD lain bidang fisik dan prasarana, dan apabila diakumulasi selama tiga tahun mencapai 43%.
6. Konsistensi terjadi jika saling mengerti semua aktor dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran, terjadinya relasi kepentingan antar semua aktor dari proses perencanaan sampai penganggaran bila mempunyai tujuan utama yang sama dalam mencapai visi misi daerah maka akan terwujudnya konsistensi perencanaan dan penganggaran.

VI.2. Saran

1. Dalam perencanaan dan program pembangunan pada setiap tahun perlu memetakan program dan kegiatan yang sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan.
2. Perlu penyesuaian antara program kegiatan dengan *output* dari tema pada setiap tahunnya.
3. SKPD perlu penajaman *output* program kegiatan berdasarkan tema prioritas pembangunan.
4. Perlu adanya kemitraan dari proses perencanaan sampai penganggaran berdasarkan tema dan *output* dari program kegiatan (melalui aplikasi dari musrenbang sampai RAPBD/aplikasi perencanaan sampai penganggaran).
5. Dalam hal pembahasan RAPBD dari KUA PPAS sampai disahkannya APBD supaya eksekutif dan legislatif memiliki kesamaan persepsi, bahwasannya anggaran daerah untuk mencapai *liniaritas* antara perencanaan pada semua dokumen sampai dengan penganggaran.
6. Pembahasan RAPBD dari KUA PPAS sampai disahkannya APBD, eksekutif dan legislatif mempunyai *liniaritas* dalam mencapai tujuan pembangunan daerah tidak sekedar bagi-bagi proyek.